

## ANALISIS FRAMING MEDIA ONLINE KOMPAS.COM TENTANG PEMBERITAAN RUU KUHP TAHUN 2019

Emy Ika Haryadi

S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, [emyika16041184064@mhs.unesa.ac.id](mailto:emyika16041184064@mhs.unesa.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji ideologi yang mendasari media kompas.com dalam memberitakan penundaan pengesahan RUU KUHP tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini untuk mengungkapkan ideologi yang ada dibalik pbingkaian berita yang dilakukan oleh kompas.com. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 12 berita dari kompas.com. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori analisis framing model Pan Kosicki yang berfokus pada teks berita yang dibagi kedalam 4 struktur sintaksis, skrip, tematik, retorik. Berdasarkan pendekatan tersebut hasil penelitian menunjukkan bahwa ideologi yang mendasari kompas.com dalam memberitakan RUU KUHP cenderung mengarah kepada dampak disahkannya RUU KUHP. Penelitian ini lebih condong ke pembentukan citra positif oleh *elite-elite* politik terutama partai Golkar. **Kata Kunci:** *Framing, Media Online, RUU KUHP.*

### Abstract

*This study examines the ideology that underlies the media kompas.com in reporting the postponement of the 2019 Criminal Code Bill. The purpose of this research is to reveal the ideology behind the framing of the news carried out by kompas.com. This study used descriptive qualitative method. The data used in this study amounted to 12 news from kompas.com. This study uses the Pan Kosicki model of framing analysis theory approach which focuses on news texts which are divided into 4 syntactic structures, scripts, thematic, rhetorical. Based on this approach, the results of the study show that the ideology that underlies kompas.com in reporting the Criminal Code Bill tends to lead to the impact of the passing of the Criminal Code Bill. This research is more inclined towards forming a positive image by elites political. **Keywords:** *Framing, Online Media, Criminal Code Bill.**

### PENDAHULUAN

Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana pada tahun 2019 menjadi kontroversial karena pasal-pasal yang dinilai sebagai pasal karet tidak ada tolok ukur untuk menentukan penjatuan ancaman hukuman pidana. Dikutip dari kompas.com pasal-pasal yang dianggap kontroversial adalah delik penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden (pasal 218-220), delik penghinaan terhadap lembaga negara (pasal 353-354), delik kesusilaan (pasal 414-419), aborsi (pasal 470), gelandangan (pasal 432), tentang unggas (pasal 278), tentang santet (pasal 252). Pasal-pasal di atas merupakan sebagian pasal yang dinilai kontroversial karena pasal tersebut dinilai terlalu masuk dalam ranah pribadi masyarakat. Banyak sekali polemik yang terjadi sepanjang peristiwa ini. Berbagai media massa nasional ikut memberitakan kasus ini dengan berbagai sudut pandang, begitu juga dengan kompas.com. Informasi yang disajikan media secara perlahan dapat mempengaruhi opini publik. Sudah banyak penelitian-penelitian yang membahas tentang realitas yang dibangun oleh media. Sedangkan framing adalah cara untuk mengetahui tentang realitas sosial yang

dibangun media tersebut. penelitian ini fokus pada informasi yang disajikan oleh kompas.com tentang RUU KUHP dengan menganalisis teks berita kompas.com dengan Framing dari Pan Kosicki.

Kompas.com merupakan situs media online, menurut studi nielsen yang melakukan survey pada kompas.com mengatakan bahwa pembaca kompas.com terbesar adalah generasi millennial (21-34 tahun) dan generasi X (35-49 tahun) (Ika, 2018). Sedangkan menurut situs Indonesia baik persentase generasi millennial di Indonesia pada tahun 2020 adalah 34% dari 267 juta jiwa penduduk Indonesia, yaitu 90.780.000 juta jiwa. Sedangkan persentase generasi X di Indonesia adalah 21% dari 267 juta jiwa penduduk Indonesia, yaitu 56.070.000 juta jiwa (Yuli, 2019). Jika dilihat dari pembaca kompas.com, ketika kompas.com menyajikan informasi tentang sebuah fenomena, yang sedang ramai diperbincangkan dimasyarakat, kemungkinan besar akan berpengaruh terhadap opini publik. Hal tersebut merupakan salah satu faktor kompas.com menjadi subjek dalam penelitian ini.

Rencana pengesahan RUU KUHP pada tahun 2019 mengundang banyak kontroversial, hal ini menyebabkan banyaknya hoax yang menyebar di kalangan masyarakat, bahkan hal ini menimbulkan konflik dan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Aksi unjuk rasa tersebut menimbulkan beragam kerugian, mulai dari fasilitas

umum, hingga korban jiwa. KUHP yang dimiliki Indonesia saat ini merupakan warisan Kolonial Belanda sehingga pembaruan KUHP itu sangat diperlukan. Pemberitaan tentang RUU KUHP patut untuk dibahas karena menyangkut hukum pidana yang ada di Indonesia. Karakteristik media online dalam menyampaikan informasi sering menjadi sorotan karena tidak mengedepankan objektivitas (akurasi, *fairliness*, kelengkapan dan imparialitas) berita hanya mengejar keintisan. Hal inilah yang kerap menjadi masalah, di satu sisi media online sangat memungkinkan penyebaran informasi jauh lebih cepat dari media konvensional, namun di sisi lain kecepatan ini mengorbankan prinsip dasar jurnalistik diantaranya akurasi berita adalah menggunakan kecepatan dan ketepatan tidak didukung akurasi berita yang baik. Tidak hanya akurasi berita, dalam hal penulisan juga banyak terjadi kesalahan karena tergesa-gesa dalam proses penulisan (Juditha, 2013). Pemberitaan RUU KUHP di media online penting untuk diangkat karena menyangkut peraturan di Indonesia, dan media yang diambil adalah media online karena media online lebih cepat dalam memberikan informasinya.

Media dikatakan baik apabila media tersebut menjalankan fungsi dan tugasnya yang telah dijelaskan dalam Harold Lasswell yaitu untuk menyampaikan informasi, edukasi, dan hiburan (Mawardi, 2012). Sebagai sarana untuk menyebarkan informasi, media dapat digunakan untuk kepentingan penguasa dalam membuat citra positif dan menggiring opini publik. Hal ini dikarenakan media mampu melewati ruang dan waktu atas peristiwa yang terjadi. (Mawardi, 2012). Menurut McQuail (dalam Leonardo, 2013) informasi yang tersedia dalam media tersebut menggambarkan kepentingan yang membiayainya, tidak aneh apabila ada sejumlah tatanan konten yang berbeda dari awalnya. Media dapat mengkonstruksi pemberitaan tentang suatu permasalahan dalam sebuah konten yang bersifat positif maupun negatif. Konten tersebut tentu dengan sendirinya akan membentuk opini publik. Maka dari itu media memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan produk media yang objektif (Dessita Chairani, 2014).

Menurut McQuail objektivitas merupakan gagasan yang relatif kompleks ketika salah satu melampaui gagasan sederhana bahwa berita haruslah laporan yang dapat diandalkan dan jujur mengenai apa yang terjadi di dunia (Dessita Chairani, 2014). Pasal-pasal kontroversial yang ada di RUU KUHP dapat menimbulkan titik rawan yang memiliki potensi untuk menimbulkan konflik. Salah satu alasan yang dapat menimbulkan konflik tersebut adalah informasi yang disampaikan oleh media atau media yang berada di pihak tertentu. Hal tersebut merupakan cara untuk membentuk tindakan khalayak tentang suatu masalah politik.

Media sebagai sebuah alat yang menyampaikan informasi selalu mengangkat sebuah ideologi tertentu. Terdapat beberapa ideologi yang bervariasi akan

membangkitkan fenomena yang sama yang disajikan secara berbeda oleh media (Pranata, 2018). Kajian ini menggunakan portal berita online Kompas.com, sebagai situs berita online Kompas.com pasti memiliki ideologi dan cara untuk mengurus sebuah organisasi, terutama dalam hal pemberitaan, seperti yang disebutkan oleh Sen & Hill (2000:59) (Arifin, 2013, p. 195) bahwa pemain di balik media kebanyakan memiliki peran penting dan berpengaruh seperti para petinggi *elite* politik, sehingga menggunakan media sebagai hal yang dapat menyampaikan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kompas.com terkenal dengan ideologinya yang nasionalis, dalam penyajian informasi Kompas.com cenderung menggunakan bahasa yang lebih halus dalam mengkritik suatu peristiwa tersebut. (Prawitasari, 2010).

Media sebagai agen konstruksi, merupakan wadah yang sangat strategis dalam rangka mengkonstruksi realitas sosial. Hal ini merujuk pada berbagai macam kepentingan di dalamnya baik politik, sosial budaya, dan agama. Dalam konteks politik dan kekuasaan media menjadi alat hegemoni untuk mempertahankan dominasi dan kekuasaan kelas yang mendominasi (Mahdi, 2015). Ada peristiwa yang diberitakan dan tidak diberitakan, ada aspek yang ditonjolkan dan ada aspek yang dihilangkan. Semua ini mengarah pada konsep yang bernama framing. Berdasarkan konsep framing yaitu ada aspek yang ditonjolkan, pada bulan September 2019 merupakan bulan aksi mahasiswa yang menolak disahkannya RUU KUHP. Pada saat yang bersamaan di bulan September terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatra dan Kalimantan yang semakin parah hingga menyebabkan langitnya menjadi merah, tidak banyak media yang mengekspose peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Sumatra dan Kalimantan. Media lebih banyak memberitakan tentang pasal-pasal kontroversial yang ada di RUU KUHP. Pemberitaan tentang RUU KUHP merupakan salah satu hal yang patut untuk diperhatikan, untuk dapat melihat bagaimana Kompas.com meringkaskan tentang pemberitaan RUU KUHP menggunakan analisis framing Zhong Dan Pan dan Gerald M. Kosicki, Konsep framing yang diusung oleh Pan Kosicki dibagi ke dalam 4 struktur besar yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retorik.

Menurut Everett Roger dalam bukunya *Communication Technology* (Rogers, 1986, p. 87), mengatakan bahwa hubungan antar media dengan sistem politik merupakan hal yang integral dalam sejarah pengembangan dan operasional media itu sendiri. Artinya, politik dan media memiliki keterkaitan erat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Para pelaku politik dan lembaga negara lainnya memperkenalkan konsep, perencanaan dan isu politik agar sampai kepada masyarakat.

Sensitivitas terhadap informasi merupakan cara masyarakat untuk memahami dinamika politik, hal yang mempengaruhi dan sering muncul dalam dinamika politik adalah tentang politik uang, dengan cara mengendalikan

masyarakat melalui media dengan sebagai investor dalam media tersebut maka media tersebut akan berpihak pada investornya atau kepentingan pemilik modal. Sehingga media juga menyediakan informasi yang baik mengenai pemilik modal. Pembahasan tentang dinamika politik mencakup interaksi politik yang berkembang pada kelompok kepentingan, partai politik dengan berbagai perubahan dari legislatif (Bailusy, 2009). Komunikasi politik, dari berbagai literatur yang dikaji umumnya dikaitkan dengan peranan media massa dalam proses komunikasi yang dilaluinya (Syobah, 2012). Kompas.com sebagai media online yang menyajikan beragam informasi mulai dari yang terbaru hingga berita-berita yang bersifat ringan. Kompas.com tergolong dalam media online di Indonesia yang sudah besar, memiliki pembaca yang tinggi, dalam kasus RUU KUHP kompas.com juga menyajikan beragam informasi mengenai RUU KUHP. mulai dari sebelum aksi unjuk rasa, unjuk rasa di depan DPR hingga pokok-pokok yang dipermasalahkan dalam RUU KUHP, semua telah disajikan oleh kompas.com. informasi yang disajikan oleh kompas.com cenderung lebih banyak pendapat dari kalangan elite politik, sehingga kompas.com dalam pemberitaan tentang RUU KUHP lebih cenderung kearah elite politik. Dalam dinamika politik, kompas.com seakan memberikan informasi tentang fakta menurut pemerintah karena yang banyak disorot dalam pemberitaan ini adalah pemerintah. Sedangkan kompas.com memberikan ruang yang sedikit untuk berita-berita tentang aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa.

Politik di Indonesia tak luput dari perhatian media, para orang-orang politik menggunakan media massa untuk menyelesaikan masalah serta untuk membentuk opini publik sesuai dengan yang mereka inginkan. banyak pemilik modal yang terjun ke dunia politik dan dengan sengaja menggunakan media sebagai media untuk melakukan kampanye, hal ini disebut sebagai politik media. politisi secara individual dapat menambah ruang privat dan publiknya, sehingga mereka tetap dapat mengurus masalah politik ketika tengah duduk di kursi kerjanya yang melalui komunikasi yang dapat menjangkau masyarakat menggunakan media massa, salah satunya media online. Terdapat 3 pelaku dalam politik media yaitu politisi, jurnalis, dan orang-orang yang memiliki kepentingan khusus (Aminah, 2006).

Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari fungsi politik hukum (Nyoman, 2019, p. 01). Hasil rangkuman penulis dari berbagai media online yang memberitakan tentang pasal-pasal RUU KUHP setidaknya ada 14 pasal yang bermasalah dalam RUU KUHP sehingga membuat pemerintah untuk menunda pengesahan RUU KUHP. Perbedaan yang terdapat dalam KUHP dan RUU KUHP adalah perbedaan penjatuhan hukuman. Moh. Mahfud MD mengatakan “politik hukum adalah *legal policy* atau arah suatu negara dalam mencapai tujuannya berupa adanya pembuatan hukum baru dan pergantian hukum” (Mahfud, 2006, p. 9). KUHP Indonesia

yang sekarang sudah ada sejak Indonesia terlepas dari para penjajah. Hukum pidana yang berlaku saat ini adalah peninggalan Kolonial Belanda, awalnya disebut “*wetboek van safrecht voor nederlandsch-indie 1915 No. 732*”, semakin berkembangnya zaman perubahan hukum pidana dianggap sangat perlu untuk melakukan perubahan atau adaptasi (Nyoman, 2019).

Kompas.com juga turut memberitakan tentang pasal-pasal kontroversial yang ada di RUU KUHP. Misalnya informasi yang diunggah di kompas.com dengan judul “Golkar dukung sikap pemerintah untuk menunda pembahasan RUU KUHP”. apabila dilihat dari judul artikel, terlihat framing dalam berita itu karena hanya menggunakan satu narasumber dan dari satu sudut pandang. Penulis ingin menggiring pembaca bahwa partai Golkar adalah partai yang merakyat dan sejalan dengan pilihan rakyat. Golkar menggunakan Kompas.com sebagai median yang dapat membentuk citra positif dalam masalah yang sedang terjadi. Sepadan dengan hasil dari kajian dari Pranata bahwa Kompas.com telah dipolitisasi oleh *elite* politik.

Media mengemas suatu peristiwa berdasarkan ideologi, media menghasilkan berita dan dikemas sesuai dengan ideologi yang lebih dominan. Tidak sekedar informasi biasa tetapi ada pemaknaan politik (Fajrin, 2018). Masyarakat pun semakin kritis dalam melihat permasalahan politik hingga permasalahan yang sensitif. Transformasi politik menjadi bagian dari kontribusi media. Media memiliki peran besar dalam membangun pemahaman masyarakat hingga perilaku politik. Media massa memiliki fungsi kontrol karena melalui informasi yang disampaikan media, media mampu memberhentikan laju kebijakan dari pemerintah yang tidak sesuai dengan masyarakat. Media massa dalam konteks sosial digunakan oleh publik, pada saat itu media dihadapkan dengan etika (Fabriar, 2014, p. 77)

Shoemaker dan Reese menyatakan pandangannya tentang etika komunikasi massa. Pertama, tanggung jawab, kedua, kebebasan pers, ketiga, masalah etis, keempat, ketepatan dan objektivitas, kelima, tindakan adil untuk semua orang (Fabriar, 2014). Globalisasi media memiliki tanggung jawab terhadap massa yang menggunakan media informasi yaitu etika media massa (Fabriar, 2014) sebagai berikut :

1. Media harus menyampaikan informasi sesuai dengan fakta, komprehensif dan cerdas.
2. Media wajib aktif sebagai wadah pertukaran pendapat, sebagai tinjauan dan catatan. Oleh sebab itu media tak hanya sebagai penyampai pesan tetapi wadah dalam menyelesaikan masalah.
3. Media patut menyampaikan representasi yang khas dari tiap kelompok yang ada di Indonesia.
4. Media wajib menampilkan dan menjelaskan tujuan dan nilai-nilai masyarakat. Hal ini tidak mengharuskan media untuk mendramatisir isi dari kontennya, tetapi hanya menghubungkan satu

peristiwa dan dasar makna eksistensi khalayak dalam hal-hal yang harus dicapai.

5. Media diharuskan menyediakan saluran ke berbagai sumber kabar berita.

Etika sebagai perwujudannya tergantung pada khalayak yang berada didalamnya, karena eksistensi etika media awalnya dari salah satu anggapan yang dapat memana media itu sendiri (Pranata, 2018). Menurut Shoemaker dan Reese ideologi merupakan penyebab yang akan mengontrol konten portal berita tersebut. Kuasa dan kekuatan yang ada di media tidak terlepas dari unsur nilai, kepentingan, hal tersebut akan dibagikan menggunakan media tersebut sehingga media terikat oleh satu golongan saja dan berpihak. Media massa melalui berbagai jenis sajian pesan, menawarkan cara pandang mengenai berbagai hal termasuk cara memandang kelompok etnis atau budaya tertentu, perempuan, pemimpin dan masyarakat tertentu (Pawito, 2014).

Kasus penodaan agama yang menjadi kontroversi dalam akhir tahun 2016. Media membingkai beritanya sesuai dengan ideologi dari setiap media masing-masing. Seperti media online kompas.com yang membingkai berita tentang kasus penistaan agama oleh Ahok dengan berita-berita yang menyatakan bahwa Ahok seharusnya tidak mendapatkan hukuman karena pasal yang digunakan terlalu general dan dinilai kurang kuat untuk membuat Ahok dinyatakan bersalah. Kompas.com menekankan bahwa mereka tidak berpihak pada Ahok dengan memunculkan berita-berita dari media Internasional yang mengatakan bahwa mereka terkejut terhadap putusan hakim terhadap onis hukuman Ahok (Ninggar & Chyntia, 2017). Selain itu, sempat ramai tentang Susi Pudjiastuti, semenjak menjabat sebagai menteri kelautan dan perikanan, namanya ramai diperbincangkan di media online karena latar belakang yang dimilikinya. Kompas.com juga ikut memberitakan tentang mantan menteri kelautan dan perikanan tersebut. Hasil penelitian dari (Suprobo, Siahainenia, & Sari, 2016, p. 135) penelitian ini menggunakan analisis framing model Pan Kosicki dengan 3 media yaitu Detik.com, Kompas.com, dan Antaraneews.com. lalu hasil dari kompas.com menggambarkan sosok menteri Susi Pudjiastuti sebagai menteri perempuan yang nyentrik dan apa adanya. Menteri Susi akan terus melakukan penenggelaman kapal pencuri ikan meski banyak yang pro dan kontra (Suprobo et al., 2016, p. 135).

Kasus lain dari media online yang menggunakan analisis framing yaitu runtuhnya terowongan tambang PT. Freeport. Keterkaitan dengan penelitian ini yaitu salah satu media yang diteliti sama dan menggunakan metode analisis framing model Pan Kosicki. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa kedua media tersebut yaitu kompas.com dan vivanews.com. karena terdapat fakta bahwa 10% saham dari PT. Freeport Indonesia berasal dari Bakrie Group, sedangkan kompas.com yang tidak memiliki kepentingan apapun merasa bahwa hal ini harus

diusut secara tuntas dan dijadikan sebagai headline di kompas.com (Prawitasari, 2010, p. 59).

Terkait dengan penelitian tentang RUU KUHP yaitu penelitian dari (Nyoman, 2019). Hasil dari penelitian menyebutkan bahwa KUHP yang sekarang ada merupakan warisan jaman Kolonial Belanda, sehingga perlu adanya penyesuaian untuk beradaptasi dengan perkembangan jaman. (Nyoman, 2019, p. 18)

Konflik politik sering kali terjadi, media menjadi penyebar informasi, yang mana para pemilik media memiliki peran penting dalam politik, misalnya saja pada pemberitaan Ganjar Pranowo dalam kasus korupsi EKTP oleh Tribunnews.com, Jawapos dan Suara Merdeka periode Agustus-November 2015 dan Maret 2017, penelitian ini juga menggunakan Analisis Framing. Hasil dari penelitiannya menyebutkan bahwa ketiga media berpihak dalam mengemas informasinya baik dalam bentuk support dan simpati terhadap sikap Ganjar Pranowo. Tribunnews.com cenderung memojokkan Ganjar Pranowo yang terjerat korupsi E-KTP, Jawapos cenderung memberi support terhadap Ganjar Pranowo, sedangkan Suara Merdeka satu-satunya media yang bersifat netral dalam pemberitaan ini.

Penelitian diatas merupakan sebagian dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, mulai dari Framing dari Pan Kosicki, konflik politik, pemberitaan tentang tokoh-tokoh politik, media yang digunakan, serta penelitian tentang RUU KUHP.

Penelitian ini menggunakan analisis framing, penelitian ini bertujuan untuk melihat pembingkai media online kompas.com terhadap pemberitaan penundaan pengesahan RUU KUHP tahun 2019. Framing yang digunakan dalam penelitian ini adalah model dari Zhong Dang dan Pan Kosicki, karena model ini adalah model yang banyak dipakai dan Pan Kosicki menjabarkan sebuah model yang sangat detail tentang pembingkai berita. pada perspektif komunikasi framing digunakan sebagai cara untuk mengupas ideologi media saat mengkonstruksi suatu informasi (Alex, 2004, p. 162). Konsep framing kerap dipakai sebagai gambaran prosedur seleksi dan menekankan bagian khusus dari realitas oleh media (Eriyanto, 2002, p. 252). Terdapat dua konsep di framing yang yaitu memilih fakta dan menuliskan fakta (Muzakkir, 1988, p. 184). Menurut De Vreese Frame merupakan hasil akhir dari proses produksi berita, untuk memahami hal tersebut Eriyanto menjelaskan tahapan dalam proses produksi berita, tahap paling awal yaitu bagaimana wartawan mempersepsi fakta yang akan diliput. Wartawan dalam hal ini membatasi pola pikirnya sendiri dalam menentukan mana peristiwa yang layak disebut sebagai berita itu sendiri, jadi berita adalah peristiwa yang ditentukan sebagai berita, bukan peristiwa itu sendiri (Pinontoan Nexen Alexandre, 2020). Framing Pan Kosicki dibagi ke dalam 4 struktur besar yaitu : (Pan & Kosicki, 1993).

- a. Struktur Sintaksis : berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun berita(judul, lead, latar informasi, pernyataan penulis dan kutipan).
- b. Struktur Skrip : dilihat dari kelengkapan berita yaitu 5W+1H.
- c. Struktur Tematik : cara pandang wartawan atas suatu peristiwa kedalam proposisi, berhubungan dengan fakta yang ditulis wartawan
- d. Struktur Retoris : berhubungan dengan cara wartawan menekankan arti tertentu dari pilihan gaya, kata, atau gambar.

## METODE PENELITIAN

Kajian ini berjenis kualitatif memakai pendekatan paradigma konstruktivis. Penelitian ini memandang bagaimana konstruksi atau struktur yang dilakukan oleh Kompas.com dalam memberitakan penundaan pengesahan RUU KUHP tahun 2019. Unit analisis dalam penelitian ini adalah berita yang dibuat oleh media Kompas.com terkait pemberitaan penundaan pengesahan RUU KUHP. Data primer dalam penelitian ini yaitu berupa beritaberita yang ada di Kompas.com tentang pemberitaan RUU KUHP, sedangkan data sekunder yaitu data pendukung dari buku tentang analisis teks media, framing dan tentang RUU KUHP, dari internet berupa survey dari media online, dan jurnal ilmiah seperti penelitian terdahulu tentang analisis framing.

Data yang diambil dalam penelitian ini yaitu berupa 12 berita dari Kompas.com dari tanggal 21-30 September 2019. Puncak dari aksi turun ke jalan pada tanggal 23 September 2019, sedangkan peneliti mengambil ditanggal itu karena sebelum aksi unjuk rasa dan sesudah aksi unjuk rasa. Bagaimana media memberikan informasi terkait RUU KUHP hingga menyebabkan aksi unjuk rasa, lalu bagaimana media memberitakan tentang aksi unjuk rasa di depan gedung DPR dengan pasal-pasal yang menjadi permasalahan, serta pasca aksi unjuk rasa. Analisis membutuhkan kreatifitas yang tinggi serta kemampuan intelektual. Ada beberapa tahap untuk melakukan analisis data yaitu :

- a. Melaksanakan pengecekan data penelitian dengan menafsirkan berita yang diunggah di Kompas.com. pada bagian ini penulis mengecek hasilnya dari aspek kelengkapan, makna yang terkandung dan pentingnya dengan inti dari informasi tersebut serta menata dan mensistematiskan data yang didapat menjadi kesatuan data.
- b. Kajian ini berujung pada upaya penafsiran atau interpretasi terhadap hasil temuan penelitian menggunakan framing model Pan Kosicki.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini dilakukan pada berita yang diunggah oleh Kompas.com tentang penundaan

pengesahan RUU KUHP mulai tanggal 21-30 September 2019.

### A. Pencatutan Opini Narasumber Sebagai Opini Kompas.com

Hasil dari riset yang telah dilakukan oleh peneliti ada 3 berita yang menggunakan kutipan narasumber sebagai judul utama. Kompas.com gunakan narasumber yang cukup berpengaruh dalam pemerintahan sebagai satusatunya narasumber dalam berita tersebut. Hal ini membuat penulis berspekulasi bahwa Kompas.com terdapat campur tangan para petinggi *elite* partai politik. Berikut beberapa berita yang gunakan kutipan narasumber sebagai judul, yaitu :

1. Fahri Hamzah : KUHP ini Demokrasi kok Pingin Balik ke Kolonial.
2. Dedy Mulyadi : Ada Kekacauan Berfikir dalam RUU KUHP.
3. Golkar Dukung Sikap Pemerintah untuk Menunda Pengesahan RUU KUHP.

#### a. Struktur Sintaksis

##### 1) *Headline*

3 judul berita yang telah dimuat dalam Kompas.com menggunakan opini narasumber sebagai judul utama, narasumber yang diambil dalam berita diatas dari salah satu partai politik di Indonesia yaitu partai Golkar. Berita diatas menunjukkan bahwa Kompas.com digunakan para *elite* politik sebagai pembentukan citra positif oleh Golkar atau sebagai kepentingan tertentu.

##### 2) *Lead*

*Lead* merupakan paragraf pertama dalam berita, lead dari ketiga berita diatas meenjelaskan tentang RUU KUHP yang sekarang adalah RUU KUHP demokrasi, yang berpihak pada rakyat. RUU KUHP yang dikaitkan dengan Pancasila, dan pembentukan citra positif oleh partai Golkar yang mengatakan bahwa mereka berada di pihak rakyat dengan ikut setuju untuk menunda pengesahan RUU KUHP.

*Lead* dari ketiga berita diatas berisi informasi utama dari Kompas.com, sedangkan yang selanjutnya hanyalah paragraf pelengkap.

##### 3) Latar Informasi

Informan yang banyak dipakai dalam Kompas.com yaitu dari partai Golkar, ada beberapa yang bukan dari partai Golkar, apabila narasumber bukan dari partai Golkar, maka orang tersebut memiliki kedudukan yang tinggi dalam pemerintah dan sangat berpengaruh atau yang biasa disebut dengan *elite* politik.

##### 4) Kutipan

Kutipan dari ketiga berita diatas berisi kutipan langsung dari para narasumber, dan kutipan yang diambil dari ketiga berita diatas kebanyakan menggunakan 2 rujukan, yaitu dari narasumber dan data pendukung seperti di RUU KUHP, Pancasila.

## b. Struktur Skrip

Struktur skrip dalam berita dilihat dari sisi kelengkapan secara umum yaitu 5W+1H. Dilihat dari kelengkapan beritanya Kompas.com menerapkan unsur 5W+1H di hampir setiap beritanya, meskipun ada satu berita yang kurang unsur *how*, sudah dijelaskan namun kurang terperinci dan kurang lengkap.

## c. Struktur Tematik

Kompas.com dalam menyajikan berita terdiri dari 4-5 paragraf yang didalamnya terdapat 2 bagian yaitu judul utama dan sub judul. Tema yang ditekankan dalam Kompas.com adalah permasalahan tentang RUU KUHP, dalam mengemas beritanya Kompas.com cenderung membagi dalam dua kubu yaitu kubu yang pro dengan RUU KUHP dan kubu yang kontra dengan RUU KUHP dan lebih menekankan pada keberpihakannya terhadap masyarakat seakan para narasumber ingin membentuk citra positif di mata masyarakat.

## d. Struktur Retoris



Gambar diatas Fahri Hamzah saat acara peluncuran bukunya yang berjudul "Arah Baru Kebijakan Kesejahteraan Indonesia" bertempat di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta

Sumber : Kompas.com

Gambar diatas menunjukkan Dedy Mulyadi saat bersama dengan anak-anak Papua yang bersekolah di Purwakarta, Kompas.com tidak melakukan wawancara secara tatap muka langsung, sehingga menggunakan gambar dokumentasi.

Sumber : Kompas.com

Gambar diatas menunjukkan saat Golkar melakukan konferensi pers dengan media, hal ini menunjukkan bahwa Golkar ingin membentuk citra positif melalui Media, dengan statement bahwa Golkar akan selalu berpihak pada rakyat dan selalu terbuka untuk rakyat.

Pengelompokan informasi yang disajikan oleh Kompas.com berdasarkan judul dari Kompas.com yaitu opini narasumber sebagai penyajian berita. Pengelompokan ini berisi tentang opini narasumber utama, dan hanya ada satu narasumber dalam berita ini. Artinya, Kompas.com hanya mengambil dari satu sudut pandang saja. Dalam pemberitaan ini Kompas.com menggunakan narasumber yang paling banyak berasal dari partai Golkar. Pengelompokan informasi yang disajikan oleh Kompas.com dalam hal ini berdasarkan dengan judul dari Kompas.com yang yaitu opini narasumber. Kompas.com menggunakan opini narasumber sebagai fokus utama dalam penyajian berita. Pengelompokan ini berisi tentang opini narasumber utama, dan hanya ada satu narasumber dalam berita ini. Artinya, Kompas.com hanya mengambil dari satu sudut pandang saja. Dalam pemberitaan ini Kompas.com menggunakan narasumber yang paling banyak berasal dari partai Golkar.

## B. Keberpihakan Minimal Terhadap Mahasiswa

Hasil dari riset yang telah dilakukan oleh peneliti ada 2 berita yang memberitakan tentang aksi unjuk rasa mahasiswa, dalam hal ini penulis berspekulasi bahwa Kompas.com hanya sedikit memihak pada mahasiswa karena hanya mengunggah 2 berita terkait aksi unjuk rasa, yaitu :

4. HMI Gelar Unjuk rasa tolak UU KPK dan RUU KUHP di depan Gedung DPR RI.
5. Tolak RUU KUHP dan UU KPK Massa Mahasiswa Bakal Bermalam di Depan DPR.

### a. Struktur Sintaksis 1)

#### Headline

Judul dalam kedua berita ini tidak menggambarkan isi dari berita secara keseluruhan, judul hanya ada penjelasan di paragraf pertama. Seperti pada berita "HMI gelar unjuk rasa tolak UU KPK dan RUU KUHP di depan Gedung DPR, untuk penjelasan judul ada di paragraf pertama, sedangkan paragraf selanjutnya lebih condong ke aparat kepolisian karena akibat aksi unjuk rasa tersebut timbul korban jiwa.

#### 2) Lead

Lead dalam teks berita hanya berisi informasi utama dari keseluruhan teks, sedangkan paragraf selanjutnya hanya menjadi paragraf pelengkap. Berita pertama awalnya menjelaskan tentang himpunan mahasiswa Islam yang menggelar aksi unjuk rasa, itu dijelaskan dibagian awal

paragraf, di paragraf lain berisi tentang aparat kepolisian.

### 3) Latar Informasi

Latar informasi yang digunakan dalam berita ini seorang mahasiswa, tidak disebutkan identitas dari narasumber dalam berita ini, kompas.com hanya menyebutnya sebagai "sang orator". Selain itu ada yang mewakili untuk berbicara di depan anggota komisi DPR yaitu Ketua BEM UI Manik Marganamahendra, sertaperwakilan dari DPR Masinton Pasaribu dan Supratman Andi Atgas.

### 4) Kutipan

Kutipan yang diambil dalam kedua berita diatas tidak langsung, Kompas.com mengutip dari media online. Sumber yang digunakan kompas.com dari situs online Antaranews.com, sumber yang digunakan kompas.com mengambil satu rujukan yaitu dari pendapat dari masingmasing narasumber.

### b. Struktur Skrip

Dilihat dari kelengkapan berita, kompas.com menyajikan informasinya dengan menerapkan unsur 5W+1H di kedua beritanya.

### c. Struktur Tematik

Tema yang ditekankan dalam kedua berita ini yaitu aksi unjuk rasa untuk tolak RUU KUHP dan UU KPK, hingga banyak kerugian yang muncul akibat aksi unjuk rasa.

### d. Struktur Retoris

Sumber : Kompas.com

Gambar yang digunakan kompas.com dalam berita ini hanya menunjukkan barisan para aparat kepolisian

Sumber: Kompas.com

Gambar yang digunakan kompas.com dalam berita ini menunjukkan massa mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI, berbagai kampus berjalan menuju DPR RI.

Pengelempokan berita ini berdasarkan pada pemberitaan tentang demo mahasiswa di depan gedung DPR. Kompas.com hanya sedikit memberikan konten tentang mahasiswa, bahkan hanya ada 2 berita dalam pengelompokan ini. Bahkan narasumber yang diambil dalam informasi ini tidak hanya dari pihak mahasiswa saja, melainkan dari pihak pemerintah. Bahkan kompas.com dalam memuat berita ini, beritanya sudah dimuat dalam situs media online yang lainnya. Artinya kompas.com hanya mengutip sama persis dengan berita yang sudah dimuat di situs online lainnya.

### C. RUU KUHP Kontroversial

Hasil dari riset yang telah dilakukan oleh peneliti ada 3 berita yang memberitakan tentang tema utama dalam pemberitaan ini yaitu RUU KUHP yang kontroversial, , yaitu :

6. DPR RI segera bahas penundaan pengesahan RUU KUHP.
7. Wanita Pulang Malam Dianggap Gelandangan, Kadin Nilai RUU KUHP ada yang Janggal.
8. Menelaah Sikap Jokowi, Mengapa Berbeda Antara RUU KUHP dan UU KPK.

### a. Struktur Sintaksis 1)

#### Headline

Jika dilihat dari pemilihan kata untuk judul, tidak berbeda dengan kompas.com gunakan opini narasumber sebagai judul utama, meskipun tidak secara gamblang menggambarkan seperti yang awal. Perbandingan sikap jokowi kenapa berbeda antara RUU KUHP dan UU KPK, pemilihan kata untuk judul terkesan provokatif karena membandingkan perbedaan sikap presiden. 2) *Lead*

*Lead* dalam teks berita kompas.com berisi pendapat dari narasumber yang berupa sindiran bagi pemerintah karena dianggap asal dalam menyusun RUU KUHP. sedangkan, paragraf selanjutnya hanya menjadi pelengkap dan kutipan dari beberapa sumber yang lain. 3) Latar Informasi

Latar Informasi yang digunakan kompas dalam berita ini berasal dari partai golkar yaitu Bambang Soesatyo, serta Johny Darmawan sebagai wakil ketua Kadin dan Oce Madril sebagai ketua pusat kajian antikorupsi. Narasumber yang diambil dalam pemberitaan ini lebih banyak menjabat sebagai ketua dan wakil ketua, sehingga memiliki pengaruh yang cukup kuat. 4) Kutipan Kutipan pernyataan dan sumber yang dipakai dalam pemberitaan ini kompas.com mengambil maksimal 2 rujukan.

**b. Struktur Skrip**

Dilihat dari kelengkapan berita kompas.com menuliskan beritanya secara lengkap dengan menerapkan unsur 5W+1H.

**c. Struktur Tematik**

Tema yang ditekankan dalam berita adalah terlepas dari aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI, berita-berita ini lebih menekankan tentang pasal-pasal kontroversial yang ada di RUU KUHP serta perbedaan sikap presiden antara RUU KUHP dan UU KPK.

**d. Struktur Retoris**



Sumber : Kompas.com

Sumber : Kompas.com

Berita ini kompas.com menggunakan gambar dari dokumentasi di DPR RI, tidak secara langsung melakukan wawancara dengan Bambang Soesatyo.



Sumber : Kompas.com

Sumber : Kompas.com

Gambar yang digunakan dalam berita ini adalah gambar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, dan yang masuk dalam frame gambar adalah seorang perempuan yang membawa poster bertuliskan “Tolak Sekarang”. Berita ini kompas.com mengambil berita dari situs media online yang sudah diunggah, dan Kompas.com hanya copy paste.

Berita ini menyertakan tentang infografik dari poin kontroversial yang ada di UU KPK. Pengelompokan ini berdasarkan isi dari berita tersebut, berita ini paling banyak membahas tentang isi dari pasal kontroversial, mulai dari pasal zina, pasal gelandangan, hingga perbandingan sikap presiden antara UU KPK dan RUU KUHP. hal ini menunjukkan bahwa kompas.com ingin menggiring opini publik tentang RUU KUHP yang bermasalah. Kebanyakan narasumber yang dipilih oleh kopas.com dalam berita ini adalah mereka yang memiliki kredibilitas tinggi seperti pengamat politik, tata negara dan Ketua Badan setara Institute.

**D. Ketakutan Wisatawan Berlibur ke Indonesia**

Hasil dari riset yang telah dilakukan oleh peneliti ada 3 berita yang memberitakan tentang efek yang ditimbulkan dalam bidang pariwisata jika RUU KUHP disahkan, yaitu :

- 9. Pasal Zina di RUU KUHP, Wisatawan Asing Batal Liburan ke Indonesia .

10. Bali Khawatir Pasal zina di RUU KUHP dimanfaatkan pesaing pariwisata dari negara lain
11. Pemprov Bali Berharap Pasal Zina dalam RUU KUHP Dihilangkan
12. Polemik RUU KUHP Bikin Wisatawan Asal Australia ini Gelisah

**a. Struktur Sintaksis 1)**

*Headline*

Pemilihan kata dalam judul tentang akibat dari RUU KUHP di bidang pariwisata terutama di pasal zina. Pemberitaan tentang pasal zina di RUU KUHP selalu dikaitkan dengan Bali. Pemberitaan ini hampir sama, intinya sama-sama menunjukkan bahwa pemprov Bali ingin pasal Zina di hilangkan. 2) *Lead*

Lead dalam teks berita kompas.com berisi informasi utama dari keseluruhan teks, sedangkan paragraf selanjutnya menjadi paragraf pelengkap saja 3) *Latar Informasi*

Latar Informasi yang dipakai dalam pemberitaan ini dari pihak pemerintah Bali yaitu Kepala dinas pariwisata Bali, Wakil Gubernur Bali, serta wisatawan asing asal Australia.

4) *Kutipan*

Kutipan pernyataan dan sumber yang dipakai oleh kompas.com maksimal 2 rujukan.

**b. Struktur Skrip**

Dilihat dari kelengkapan berita kompas.com lebih lengkap dalam menuliskan beritanya dengan menerapkan unsur 5W+1H di seluruh beritanya.

**c. Struktur Tematik**

Struktur Tematik tema yang ditekankan dalam berita ini adalah tentang pasal zina dalam RUU KUHP. jika pasal zina disahkan maka kota yang paling berdampak besar adalah di Bali karena sektor perekonomian dan pariwisata di Bali menjadi terhambat, banyak wisatawan asing yang enggan liburan di Bali karena pasal zina di RUU KUHP.

**d. Struktur Retoris**



Sumber : Kompas.com  
Kompas.com menggunakan gambar dokumentasi, tidak menggunakan gambar saat sedang melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Bali

gambar saat melakukan wawancara atau konferensi pers dengan media yang lain juga, yaitu Wakil Gubernur Bali Cok Ace memegang surat pernyataan pemprov Bali untuk menghilangkan pasal zina dalam RUU KUHP.



Sumber : Kompas.com

Kompas.com dalam berita ini menggunakan gambar demo di depan Gedung DPR RI, tidak menggunakan gambar saat melakukan wawancara



Sumber : Kompas.com  
Penulis tidak menyertakan gambar untuk wawancaranya dengan ketua dinas pariwisata, melainkan dari pihak Kompas.com menggunakan gambar saat demo di depan gedung DPR RI.

Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa kompas.com sering menggunakan gambar tidak pada saat wawancara melainkan gambar dokumentasi lama atau gambar demo di depan gedung DPR RI, padahal dalam beritanya membahas akibat dari disahkannya pasal zina terhadap pulau Dewata Bali.

**PEMBAHASAN**

Hasil analisis dari penelitian tentang framing pemberitaan penundaan RUU KUHP tahun 2019 di media online kompas.com, berita-berita yang disajikan oleh kompas.com kebanyakan menggunakan narasumber dari partai politik, yang memiliki peran penting dalam pemerintahan.



Sumber : Kompas.com

dapat diketahui bahwa kompas.com dipengaruhi oleh elite-politik untuk membentuk citra positif dari partai politik. Pernyataan narasumber dijadikan sebagai fokus utama dalam penyajian berita oleh kompas.com. Dapat dilihat dari pemilihan narasumber yang digunakan oleh kompas.com kebanyakan dari partai Golkar, mulai dari ketua partai Golkar yaitu Airlangga Hartato, selain menjabat sebagai ketua partai Golkar, Airlangga Hartato juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dedy Mulyadi yang menjabat sebagai Bupati Purwakarta, Bambang Soesatyo yang menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Kompas.com banyak menggunakan para elite politik

Kompas.com menggunakan gambar saat melakukan wawancara atau konferensi pers dengan media yang lain sebagai narasumber, terutama dari partai Golkar. juga, yaitu Wakil Gubernur Bali Cok Ace memegang Narasumber-narasumber yang telah ditentukan tersebut surat pernyataan pemprov Bali untuk menghilangkan kemudian diwawancarai dan

memberikan pernyataan pasal zina dalam RUU KUHP Kompas.com menggunakan berupa dukungan pada DPR, lalu dikutip untuk kemudian

diletakkan dibagian yang paling penting yaitu *headline* dan *lead*.

Jika dilihat dari sudut pandang media saat ini, Kompas.com telah membentuk jarak dalam fakta lapangan. Berita yang diunggah dalam Kompas.com adalah sebuah laporan atas kejadian yang terjadi saat itu. Menyajikan informasi secara lengkap dengan sumber informasi yang jelas dan berimbang. Tetapi, realitanya Kompas.com tidak melakukan hal tersebut, Kompas.com lebih banyak menggunakan narasumber dari kalangan *elite* politik. Menggunakan satu narasumber, Menggunakan maksimal dua sumber sebagai rujukan yaitu dari narasumber itu sendiri dan dari RUU KUHP, yaitu terdiri dari pasal-pasal kontroversial.

Hasil dari penelitian dapat dijelaskan menggunakan teori konstruksi sosial. Teori konstruksi sosial dijelaskan bahwa manusia merupakan produk dari masyarakat dan masyarakat merupakan produk dari manusia. Disini kita melihat bahwa Kompas.com ikut andil dalam menciptakan sebuah realitas di masyarakat. Realitas bahwa pasal-pasal RUU KUHP merupakan pasal kontroversial dan merugikan masyarakat. RUU KUHP tahun 2019 merupakan bentuk update terbaru dari KUHP. KUHP merupakan warisan dari kolonial Belanda, media sebagai penyebar informasi kepada masyarakat menarik kesimpulan dari satu sudut pandang, dan langsung menyebarkan kepada masyarakat.

Seperti yang dikutip dari Menkumham yaitu "ini sudah ada dalam KUHP lama, kita hanya memperbarui di RUU KUHP yang baru, hanya saja penjatihan hukuman denda di KUHP lama lebih ringan" pasal yang mengatur tentang unggas dalam RUU KUHP diatur dalam pasal 278, sedangkan dalam KUHP diatur dalam pasal 548. Informasi yang disajikan media kepada masyarakat hanya berupa judul-judul clickbait yang menarik masyarakat untuk segera membacanya.

Konsentrasi media massa hanya pada beberapa masalah masyarakat untuk ditayangkan sebagai isu yang lebih penting dibandingkan dengan isu yang lain (Anggoro, 2017). Pada asumsi tersebut dapat dijelaskan bahwa media tidak mencerminkan kenyataan, sama halnya dengan Kompas.com. Narasumber yang paling banyak diambil dalam pemberitaan ini adalah orang-orang dari partai Golkar, yang mana hal tersebut dapat digunakan partai Golkar sebagai pembentukan citra positif, dan masyarakat akan menganggap bahwa Golkar adalah partai yang aktif untuk menunda pengesahan RUU KUHP. Kompas.com kurang memberikan tempat untuk pernyataan lain atau keberpihakan minimal terhadap mahasiswa. Kompas.com hanya berfokus pada sudut pandang dari pihak *elite* politik di kalangan pemerintah. Penulisan kasus ini dalam Kompas.com ingin pengertian

sikap dan tindakan masyarakat umum tentang pemberitaan RUU KUHP di Kompas.com. Dalam hal ini Kompas.com berupaya untuk mempengaruhi realitas sosial dalam khalayak guna memprovokasi suasana saat itu dengan berita-berita yang menyudutkan salah satu pihak. Media tidak hanya sebagai sarana yang menyajikan informasi kepada khalayak tentang peristiwa politik sesuai dengan informasi dan kejadian di lapangan, tapi tergantung pada kepentingan pemilik media.

### PENUTUP Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian di atas dapat disimpulkan tentang pemberitaan Kompas.com terhadap RUU KUHP yaitu :

1. Perbandingan berita di Kompas.com, dari 12 berita 5 berita diantaranya menggunakan pendapat narasumber sebagai judul utama dalam setiap pemberitaan yang disajikan Kompas.com. Kebanyakan berita yang menggunakan judul dari pendapat narasumber lebih cenderung mengarah pada DPR.
2. Media online Kompas.com dalam memilih narasumber lebih banyak dari salah satu parpol yaitu Golkar. Mulai dari ketua Golkar hingga anggota Golkar yang berada di daerah tertentu. Hal ini membuktikan bahwa Kompas.com mendapat campur tangan *elite* politik yang digunakan untuk membentuk citra positif dan menarik simpati masyarakat terhadap permasalahan yang telah ada saat itu.
3. Aspek pernyataan yang mengandung banyak subjektifitas lebih diutamakan dibandingkan aspek *what* yang seharusnya menjadi bagian terpenting dalam sebuah berita. Informasi yang disajikan lebih didominasi dengan pernyataan dari narasumber. Porsi dari pernyataan yang dimuat dalam berita terkait RUU KUHP lebih banyak dibandingkan dengan perkembangan yang terjadi dalam kasus tersebut. Dalam hal ini sangat jelas sekali bahwa Kompas.com memberikan penekanan terhadap unsur *who* melalui pernyataan yang diambil dari narasumbernya..

### Saran

Berdasarkan hasil simpulan dari penelitian ini. Media merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang digunakan untuk memperoleh informasi. Adanya keberpihakan media membuat masyarakat menjadi bingung akan informasi yang disampaikan dari berbagai media. Media seharusnya bersifat netral bahkan harus memihak kepentingan masyarakat untuk kepentingan umum.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Alex, S. (2004). Analisis Teks Media. In *Bandung: Penerbit Rosdakarya*.
- Aminah, S. (2006). Politik Media, Demokrasi dan Media Politik. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 19(3), 35–46. Retrieved from <http://journal.unair.ac.id/MKP@politik-media,-demokrasi-dan-media-politik-article-2202-media-15-category-.html>
- Anggoro, I. A. (2017). *oleh Zhongdang Pan dan Gerald M.Kosicki. Analisis ini mempunyai empat perangkat*.
- Arifin, P. (2013). Persaingan Tujuh Portal Berita Online Indonesia berdasarkan Analisis Uses and Gratifications. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(2), 195–211. <https://doi.org/10.24002/jik.v10i2.353>
- Bailusy, M. K. (2009). *Dinamika Politik Lokal*. 401–412.
- Dessita Chairani, D. K. (2014). Konstruksi Realitas Dalam Pemberitaan Pelantikan Presiden Joko Widodo Analisis Framing Pada Laporan Utama Majalah Tempo dan Majalah Gatra. *Journal Communication Spectrum*, Vol. 3 No., 19.
- Eriyanto, E. (2002). *Analisis Framing Kontruksi , Media, Ideologi dan Politik Media*.
- Fabriar, S. R. (2014). Etika Media Massa Era Global. *AnNida : Jurnal Komunikasi Islam*.
- Fajrin, E. A. (2018). *Analisis Framing Pemberitaan PKI di Media Online (Studi Terhadap VIVA.co.id)*. Retrieved from <http://repository.iainpurwokerto.ac.id>
- Ika, A. (2018). Survei Nielsen: Media Digital dan Media Konvensional Saling Melengkapi. Retrieved September 8, 2020, from Kompas.com website: <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/15/093533926/survei-nielsen-media-digital-dan-mediakonvensional-saling-melengkapi?page=all>
- Juditha, C. (2013). *Akurasi Berita dalam Jurnalisme Online ( Kasus Dugaan Korupsi Mahkamah Konstitusi di Portal Berita Detiknews ) News Accuracy in Online Journalism ( News of Alleged Corruption The Constitutional Court in Detiknews )*. 16(3), 145–154.
- Leonardo, J. (2013). Analisis Framing Pemberitaan Konflik Partai Nasional Demokrat (Nasdem) di Harian Media Indonesia dan Koran Sindo. *Pemberitaan Konflik Partai Nasdem Di Harian Media Indonesia*, 1.
- Mahdi, A. (2015). Berita Sebagai Representasi Ideologi Media (Sebuah Telaah Kritis). *Al-Hikmah*, 9(2). <https://doi.org/10.24260/al-hikmah.v9i2.324>
- Mahfud, M. (2006). *Politik Hukum Indonesia*.
- Mawardi, G. (2012). Pembingkai Berita Media Online (Analisis Framing Berita Mundurnya Surya Paloh dari Partai Golkar di [mediaindonesia.com](http://mediaindonesia.com) dan [vivanews.com](http://vivanews.com) Tanggal 7 September 2011). *Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia, Jakarta*, (September 2011).
- Muzakkir. (1988). *Analisis framing dalam pemberitaan media*. 183–196.
- Ninggar, E. H., & Chyntia, V. (2017). *Analisis Framing Media Massa ( Republika.co.id dan Kompas . com ) Dalam Vonis Hukuman Dugaan Kasus Penodaan Agama Oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama*. 167–175.
- Nyoman, R. (2019). Rancangan KUHP Nasional Sebagai Rancangan Pembaharuan Hukum Pidana Yang Perlu Dikritisi. *Hukum*, 7 no. 02, 19.
- Pan, Z., & Kosicki, G. M. (1993). Framing analysis: An approach to news discourse. *Political Communication*. <https://doi.org/10.1080/10584609.1993.9962963>
- Pawito, H. (2014). *Meneliti ideologi media : catatan singkat*. 7(1), 5–14.
- Pinontoan Nexen Alexandre, U. W. (2020). *Analisis Framing Pemberitaan Banjir Jakarta Januari 2020 Di*. (January), 11–24.
- Pranata, A. (2018). *Analisis Framing Pemberitaan Di Media Kompas Dan Jawa Pos (Analisis framing pemberitaan Ahok dan surat Al-Maidah di media Kompas dan Jawa Pos edisi bulan November)*.
- Prawitasari, D. (2010). Analisis Framing Pemberitaan Kompas.com dan Vivanews.com Pada Peristiwa Runtuhnya Terowongan Tambang PT Freeport Indonesia. *Commonline Departemen Komunikasi*.
- Rogers, E. M. (1986). Communication Technology : The New Media in Society. In *Communication Technology and Society*.
- Suprobo, T., Siahainenia, R., & Sari, D. K. (2016). Analisis Framing Media Online Dalam Pemberitaan Profil dan Kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti (Studi Pada Situs Berita Detik.com, Kompas.com dan Antarnews.com periode Oktober - Desember 2014). *Cakrawala*, 5(1), 119–138. Retrieved from <http://ejournal.uksw.edu/cakrawala/article/view/49>
- Syobah, N. (2012). *Peran Media Massa Dalam Komunikasi Politik*. (1), 13–24.
- Yuli, N. (2019). Yuk, Kenalan Dengan Millennial Indonesia. Retrieved September 7, 2020, from [IndonesiaBaik.id](http://IndonesiaBaik.id) website:

<http://indonesiabaik.id/infografis/yuk-kenalandengan-millennial-indonesia>